



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Juli 2021

Halaman: 8

APBD-Danais Diminta Fokus untuk Covid-19

Pemerintah juga diharapkan dapat menjamin pangan masyarakat selama PPKM darurat.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — DPRD DIY meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk memfokuskan pengalokasian APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19. Termasuk mendukung sarana dan prasarana serta bantuan bagi masyarakat dengan menyelaraskan alokasi dana antara pemda dan pemerintah pusat.

Pasalnya, di masa PPKM darurat banyak masyarakat yang terdampak. Terutama bagi pelaku usaha yang tidak diperbolehkan beroperasi selama PPKM darurat. "Harapan kita APBD dan Danais fokus untuk itu. Mudah-mudahan DPRD dan Pemda DIY bisa bersinergi membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan," kata Eko dalam keterangan resminya kepada Republika, Kamis (8/7).

Pemerintah juga diharapkan dapat menjamin pangan masyarakat selama PPKM darurat. Terutama bagi mereka yang merupakan buruh atau pekerja dengan penghasilan harian. "Prinsipnya tidak boleh ada satu pun rakyat yang kelaparan

akibat pandemi ini," ujarnya.

Dinas Sosial (Dinsos) DIY menyebut sebelumnya, bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak PPKM darurat akan disalurkan oleh pemerintah pusat pada Juli 2021 ini. Per bulan, BST yang disalurkan untuk masyarakat sebesar Rp 300 ribu.

Kepala Dinsos DIY, Endang Pamtarsih mengatakan, total BST yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu untuk bulan Mei dan Juni. Namun, penyalurannya BST di Mei dan Juni tersebut diberikan pada Juli ini.

"Ini baru berproses revisi anggaran (oleh Kemensos), tapi sudah pasti diserahkan di bulan Juli. Karena kondisi PPKM darurat, kebijakan pemerintah untuk perpanjangan BST Mei dan Juni, tapi diberikannya Juli, maka *double* diberikan Juli," kata Endang belum lama ini.

Pihaknya juga tengah melakukan penyaliran terkait dengan pelaku usaha yang terdampak PPKM darurat. Direncanakan, pelaku usaha yang terdampak ini akan diberikan bantuan, terutama pelaku usaha yang tidak dapat beroperasi selama PPKM darurat.

"Kita baru melakukan revisi anggaran lagi, kita lakukan penyaliran anggaran kita untuk di PPKM darurat, apa yang kita bisa bantu untuk teman-teman terdampak," jelasnya.

Terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat, Satpol PP DIY menyebut, tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan selama PPKM darurat jika dibandingkan dengan PPKM mikro.

Rata-rata, laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran PPKM darurat ini mencapai 200 laporan per harinya. Jumlah ini, kata Noviar, meningkat dua kali lipat dibandingkan saat PPKM mikro yang rata-rata hanya 100 laporan per hari.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya sudah menemukan lebih dari 600 pelanggaran sejak 3-6 Juli diterapkannya PPKM darurat. Dari jumlah pelanggaran tersebut, ada 396 sektor non esensial yang beroperasi dan langsung dilakukan penindakan dengan penutupan paksa.

Selain itu, ada 213 restoran yang masih melayani makan/minum di tempat (dine in) dan ada sembilan tempat usaha yang disegel. Penyelenggaraan tempat usaha ini dikarenakan tetap membuka usahanya setelah sebelumnya ditutup paksa oleh pe-

tugas.

"Saat PPKM mikro masih longgar, dine in dibolehkan dengan kapasitas 50 persen sampai jam 20.00 WIB dan di atasnya baru take away dan sektor non esensial tidak diatur dalam PPKM mikro. Tapi di PPKM darurat sejak buka pagi sampai tutup tidak boleh dine in, tentu pelanggaran lebih besar saat PPKM darurat dibandingkan PPKM mikro," kata Noviar dalam wawancara yang digelar secara virtual, Rabu (7/7).

Bahkan, mobilitas masyarakat juga masih cukup tinggi. Noviar menuturkan, mobilitas masyarakat di DIY baru turun 15 persen. "Kepatuhan masyarakat terkait aturan-aturan PPKM masih rendah, mobilitas masyarakat di DIY baru berkurang antara 13-15 persen," ujarnya.

Sehingga, penurunan mobilitas masyarakat di DIY masih jauh dari target yang ditentukan. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menargetkan bahwa mobilitas warga di DIY dan Jawa Tengah setidaknya dapat turun 50 persen atau minimal 30 persen di masa PPKM darurat.

"Kalau seperti ini terus, tidak ada peningkatan disiplin dari masyarakat, kalau masih belum turun (kasus Covid-19) karena mobilitas masyarakat masih tinggi, kita susah habis-habisan, sia-sia yang kita lakukan," jelas Noviar. ■ ed: ferman rahadi

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Segera	☐ Untuk Diketahui
Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			
4. BPKAD			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005